

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2017). *Indikasi Maraknya Aksi Unjuk Rasa di Daerah*. Jurnalintelijen.Net. <https://jurnalintelijen.net/2017/08/07/maraknya-aksi-unjuk-rasa-di-daerah-indikasi-apa/>
- Badaruddin, S., Basri, N. F., Majene, N., Wahyuni, S., & Majene, N. (2020). *Jurnal Qisthosia : 1*, 130–144.
- Dewi, R. (2017). Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik [Case Study of Public Rejection of Public Policy]. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 5(1), 6.
- Habsyah, S. (2022). *PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG AKSI UNJUK RASA WARTAWAN MEMPEROTES WALIKOTA MEDAN*. 1–87.
- Irwadi, B. (2021). Penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung anarkis di kota samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(2), 12.
- Kewarganegaraan, H. D. A. N., Sosial, F. I., & Semarang, U. N. (2011). *Pelaksanaan tugas kepolisian dalam penanganan unjuk rasa di wilayah hukum polres kudus*.
- MPR, & Jendral, S. (1945). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH*.
- Negara Republik Indonesia, K. K. (2012). *PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012*. 20. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Pranadji, T. (2016). Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) serta Penanganannya

- dalam Alam "Demokrasi" di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26(2), 132. <https://doi.org/10.21082/fae.v26n2.2008.132-143>
- Priyantoko, G., Daerah, K., & Utara, S. (2016). *Penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa*. 1(9), 109–136.
- Rahmadanita, A. (2019). PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 1, 95–104. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>
- Republik Indonesia, P. (1998). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998. 1*.
- Riyanta, B. S. (2016). *Strategi Korporasi Menghadapi Unjuk Rasa dan Konflik Horizontal*. 1–5.
- Surabaya, P. D. K. (2020). *Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur*. 1–13. https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/PERDA_59.pdf
- Surabaya, P. K. (2022). *Proses Bisnis Instansi Pemerintah Kota Surabaya*.
- Surabaya, W. (2015). *Salinan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur. 1965*, 1–7. https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf
- Suradinata, E., & Lukman, S. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja*. 6(02), 829–843.
- Syahbana, R. (2013). Penerapan Prosedur Tetap Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(9), 1689–1699.
- Virianita, R. (2008). Partisipasi Buruh Dalam Aksi Unjuk Rasa. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3), 321–336. <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i3.5878>

Yuliawati, Y. (2019). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI UNJUK RASA MAHASISWA YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN PADA FASILITAS UMUM DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI*. 28.

Zulfikar. (2013). POLA JARINGAN KOMUNIKASI KELOMPOK DALAM MENUMBUHKAN SOLIDARITAS AKSI UNJUK RASA MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.